

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2025**



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

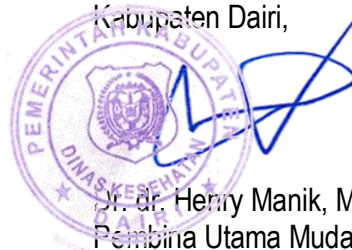
Dengan memanjatkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunannya, Perubahan Rencana Kerja ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024- 2025 dan juga mempertimbangkan hasil hasil evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Triwulan I dan II Tahun 2025. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan dan menjadi pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.

Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini. Semoga Tuhan senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Dairi dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Dairi.

Sidikalang, September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dairi,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Dairi Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI' and 'DINAS KESEHATAN'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Dr. dr. Henry Manik, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680623 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN II DINKES KABUPATEN DAIRI..... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025 6

2.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 14

2.1.2 Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan..... 15

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 17

2.2.1 Capaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2025..... 17

2.2.2 Capaian SPM dan IKK Dinas Kesehatan Tahun 2025..... 17

2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD 20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN..... 23

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 23

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 26

4.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
Tahun 2025 26

BAB V PENUTUP..... 56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amandemen UUD tahun 1945 pasal 28 huruf H memandang kesehatan sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia dan sekaligus merupakan kewajiban semua pihak (individu, masyarakat, dan negara) untuk menciptakan suatu kondisi di mana setiap warga negara dalam keadaan selalu sehat sehingga mereka dapat berproduksi baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup sehat dan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu. Dalam rangka pemenuhan hak - hak tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban melakukan upaya-upaya pembangunan kesehatan.

Di Kabupaten Dairi, Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kabupaten Dairi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati di bidang Kesehatan. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan, namun demikian masih ada permasalahan di bidang kesehatan yaitu masih adanya potensi kematian ibu, bayi, balita, serta gizi buruk. Tingginya angka penyakit menular potensial wabah terutama demam berdarah dan penyakit akibat gaya hidup (misalnya penyakit degeneratif) juga merupakan permasalahan ganda epidemiologi yang tetap menjadi tantangan pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dokumen Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Renja Perubahan Dinas Kesehatan juga mengakomodir usulan tambahan yang menyesuaikan dengan adanya penyesuaian pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK TA. 2025, DBH CHT TA. 2025, dan SILPA Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi dan mengacu kepada

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025. Visi misi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD diterjemahkan kedalam Renstra lima tahunan bagi Perangkat Daerah dan dokumen RKPD tahunan daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi pada prinsipnya berorientasi kepada proses dengan melakukan berbagai pendekatan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Penyusunannya juga berupaya mensinergikan dan memperhatikan keberadaan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM/Renstra pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, serta dokumen lainnya yang berhubungan.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2025 sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renja ini disusun dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Perubahan Renja disusun berdasarkan analisis kondisi obyektif untuk memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja adalah sebagai berikut;

1. Mendeskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
2. Menjadi pedoman pelaksanaan program, sub kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan;
3. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah;
4. Menjadi dasar bagi penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;

5. Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat;
6. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN II DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAIRI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025

Evaluasi merupakan suatu proses penilaian terhadap pencapaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi pembangunan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai hasil. Hasil evaluasi dipergunakan sebagai umpan balik untuk perencanaan berikutnya. Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi adalah penjabaran perencanaan tahunan sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi adalah perencanaan lima tahunan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi menyajikan dasar pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pengukuran kinerja tujuan dan sasaran dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana kerja Dinas Kesehatan sampai Triwulan II tahun 2025 telah mencapai 68,75% dengan realisasi keuangan mencapai 53,26%. Beberapa faktor yang menghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya cermatnya dalam penyusunan tahapan pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan sampai dengan triwulan II tahun 2025.
- b. Beberapa paket pekerjaan terkait dengan pekerjaan fisik masih dalam proses tender sehingga realisasi anggarannya masih kecil.
- c. Beberapa kegiatan dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa hambatan, baik dari segi teknis maupun administrasi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut Langkah-langkah yang diperlukan pada triwulan-triwulan berikut, antara lain :

- a. Perlunya pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.
- b. Pelaksanaan paket lelang tepat waktu, dan perlunya koordinasi lintas sektor untuk memenuhi target indikator sasaran.
- c. Mengoptimalkan sumber daya untuk tetap dapat mencapai target kinerja semaksimalnya dengan keterbatasan anggaran.

Selanjutnya rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan sampai Triwulan II
Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025	
			Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>					
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	980.000.000	- Unit	7.800.000,00
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	1.775.000.000	- Unit	47.714.930,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit	2.575.000.000	- Unit	2.900.000,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit	885.000.000	- Unit	500.000,00
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	80 Unit	527.000.000	- Unit	1.979.900,00
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	80 Unit	100.000.000	- Unit	-
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3.904.500.000	- Paket	57.993.059,00

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4	Paket	80.000.000	-	Paket	-
<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>							20.157.897.053,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.222	Orang	490.000.000	2.477	Orang	1.127.906.500,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.158	Orang	140.000.000	2.764	Orang	27.315.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.824	Orang	140.000.000	2.619	Orang	34.565.419,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35.889	Orang	90.000.000	12.510	Orang	22.079.960,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50.843	Orang	90.000.000	-	Orang	85.800.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	205.848	Orang	75.000.000	52.521	Orang	5.338.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35.623	Orang	75.000.000	22.678	Orang	21.048.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89.928	Orang	75.000.000	17.462	Orang	2.169.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.949	Orang	75.000.000	2.711	Orang	2.169.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	486	Orang	75.000.000	809	Orang	113.116.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.243	Orang	300.000.000	3.002	Orang	150.421.705,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9.110Orang	75.000.000	3.643Orang	10.406.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1Dokumen	30.000.000	-Dokumen	1.100.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3Dokumen	75.000.000	1Dokumen	996.292.360,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1Dokumen	30.000.000	1Dokumen	16.780.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1Dokumen	425.000.000	1Dokumen	101.389.912,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1Dokumen	45.000.000	1Dokumen	1.800.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1Dokumen	45.000.000	1Dokumen	7.110.000,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2Dokumen	90.000.000	1Dokumen	65.420.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	205.848Orang	75.000.000	2.979Orang	42.116.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30Orang	45.000.000	15Orang	5.028.000,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3Dokumen	202.949.000	1Dokumen	924.015.400,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1Dokumen	32.589.925.600	1Dokumen	15.400.839.901,00
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1Paket	40.000.000	-Paket	-
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1Dokumen	52.500.000	-Dokumen	-

	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1Dokumen	1.292.140.136	2Dokumen	768.106.140,00
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1Dokumen	183.150.000	1Dokumen	184.540.000,00
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1Dokumen	45.000.000	1Dokumen	1.200.000,00
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1Unit	250.000.000	1Unit	36.255.756,00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5Orang	10.000.000	-Orang	1.769.000,00
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7Tatanan	30.000.000	-Tatanan	1.800.000,00
	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</i>					
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1Dokumen	94.244.000	1Dokumen	8.100.400,00
	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>					
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1Unit	45.000.000	1Unit	8.279.000,00
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	18Unit	45.000.000	18Unit	4.738.000,00
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>					

	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	Dokumen	15.000.000	-	Dokumen	2.434.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	Dokumen	45.000.000	1	Dokumen	7.110.000,00
	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>							
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	210.750.000	1	Dokumen	4.200.000,00
	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		250		699.250.000	73		336.073.240,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250	Orang	699.250.000	73	Orang	336.073.240,00
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>							
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	Dokumen	60.000.000	1	Dokumen	10.160.000,00
	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>		1		70.000.000	1		1.000.000,00

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	Dokumen	70.000.000	1	Dokumen	1.000.000,00
	<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>		20		39.970.000	20		18.000.000,00
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	20	unit	39.970.000	20	unit	18.000.000,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		2					
	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>							
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Dokumen	37.500.000,00	1	Dokumen	3.500.000,00
	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>							
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen	242.500.000	1	Dokumen	48.706.000,00
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							

<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	72.368.116	1Dokumen	7.384.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5Laporan	30.000.000	3Laporan	-
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1Dokumen	47.250.000	-Dokumen	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20Orang	150.000.000	-Orang	-
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	30.000.000	-Paket	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	303.908.000	-Paket	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	100.000.000	-Paket	13.580.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	75.000.000	-Paket	40.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12Laporan	399.995.200	6Laporan	57.251.000,00
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1Laporan	27.560.000	1Laporan	8.383.990,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1Laporan	6.668.924.748	2Laporan	2.317.341.722,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	7.500.000	1Laporan	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Laporan	29.710.000	-Laporan	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1Unit	42.180.000	1Unit	22.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3Unit	133.880.000	-Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	1.197.420.000	-Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	1.031.075.200	-Unit	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	932orang/bulan	108.846.381.133	932orang/bulan	66.753.451.138,00

Dalam mengevaluasi capaian dan analisis kinerja Dinas Kesehatan mengacu kepada

2.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Dairi, Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi telah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan SKPD Dinas Kesehatan beserta indikator dan target IKU tahun 2025. Adapun IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2025 adalah Angka Harapan Hidup, Indeks Kesehatan, dan Predikat Laporan Kinerja.

Dalam penetapan target kinerja pada tahun 2025 target Indeks Kesehatan adalah 0,84 poin. Peningkatan indeks kesehatan menunjukkan bahwa adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Dairi.

2.1.2 Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

SPM Kesehatan merupakan urusan wajib setiap Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. SPM Bidang Kesehatan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan 12 (dua belas) indikator. Pencapaian indikator SPM bidang kesehatan Kabupaten Dairi sampai dengan triwulan II tahun 2025 pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah
				2025	Pada Triwulan
				Target	II
1	2	3	4	5	6
1	DINAS KESEHATAN	Cakupan masyarakat menjadi anggota JKN	%	96	95.63
		Cakupan pelayanan kesehatan lapangan sesuai standar	%	100	100,00
		Persentase penanganan kejadian gawat darurat sesuai standar	%	100	100,00
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan BMHP esensial	%	100	100,00
		Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	%	100	100,00

		Persentase puskesmas dengan jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	50,00
		Persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat keahlian	%	100	100,00
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	84.41
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100,00
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	96.31
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100,00
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	0
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	19.48
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	94.47
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	17.68

		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	39.59
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	78.62
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	20.76
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	20.60

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Capaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2025

1. Indeks Kesehatan

Dalam penetapan target kinerja pada tahun 2025 target Indeks Kesehatan adalah 0,84 poin.

2.2.2 Capaian SPM dan IKK Dinas Kesehatan Tahun 2025

1. Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar

Pada Tahun 2025 target indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan sampai triwulan II sudah mencapai 84.41%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian adalah memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya dipuskesmas, selain itu dengan melakukan kerjasama dengan lintas sektor untuk mengendalikan jumlah kehamilan tidak diinginkan.Selain itu kerjasama dengan lintas sektor dan kader kesehatan untuk pendataan dan pemantauan ibu hamil.

2. Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar

Pada Tahun 2025 target indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan sampai triwulan II sudah mencapai 100%. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melakukan kunjungan rumah, sosialisasi persalinan selamat, kerjasama dengan klinik swasta atau praktek mandiri, mengoptimalkan pelayanan PONEC dan PONEK, meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam KIE ibu hamil, mengembangkan kelas ibu hamil untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melibatkan kader dan masyarakat.

3. Cakupan bayi baru lahir (0-28 hari) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pada Tahun 2025 target indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan sampai triwulan II sudah mencapai 96.31%. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan memantau bayi baru lahir sejak awal kehamilan serta melakukan kerjasama dengan linsek dan kader kesehatan.

4. Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pada Tahun 2025 target indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan sampai triwulan II sudah mencapai 100%. Hal ini disebabkan meningkatnya kunjungan balita ke Posyandu. Dinas kesehatan melalui Puskesmas melakukan optimalisasi kegiatan dengan melakukan sweeping.

5. Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Pada tahun 2025 triwulan II, jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar masih sangat rendah yakni hanya sebesar 0%.

6. Cakupan usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Pada Tahun 2025 target indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan sampai triwulan II baru mencapai 19.48%.

7. Cakupan Usia 60 ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Pada Tahun 2025 target indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan sampai triwulan II sudah mencapai 94.47%.

8. Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\geq$ 15 Tahun

Pada Tahun 2025 target indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan sampai triwulan II sudah mencapai 17.68%.

9. Cakupan penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\geq$ 15 Tahun

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi pengukuran

gula darah, edukasi dan terapi farmakologi. Pada Tahun 2025 target indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan sampai triwulan II sudah mencapai 39.59% .Dukungan dari Puskesmas dan gencarnya upaya monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh dinas kesehatan berkontribusi terhadap meningkatnya capaian indikator tersebut.

10. Cakupan penderita TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi Pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dan edukasi. Pemeriksaan klinis adalah pemeriksaan gejala dan tanda. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis. Sedangkan edukasi berupa edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.

Pada Tahun 2025 target indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan sampai triwulan II sudah mencapai 20.76% tahun 2025. Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah membentuk jejaring PPM, menjalankan mandatori notification kasus tb, mengajukan kebutuhan tenaga analis, advokasi lintas sektoral dan mengusulkan kembali pelatihan dots pada petugas baru

11. Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada odgj berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi pemeriksaan status mental, wawancara, edukasi kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan jika diperlukan.

Realisasi pada Tahun 2025 target indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan sampai triwulan II sudah mencapai 78.62 %. Dinas kesehatan juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan jiwa diantaranya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi rutin ke masyarakat terkait dengan kesehatan jiwa dan penanganannya serta bekerjasama dengan masyarakat jika ditemukan adanya masyarakat yang mengalami kecenderungan gangguan jiwa.

12. Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

Realisasi cakupan orang berisiko terinfeksi HIV AIDS (ibu hamil, pasien tb, pasien ims, waria/transgender, pengguna narkoba dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV AIDS untuk triwulan II tahun 2025 sebesar 20.60%. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan HIV/ AIDS yakni dengan optimalisasi kegiatan skrining, melakukan monitoring dan evaluasi di layanan terkait dengan capaian dan laporan HIV. Memberikan informasi sebanyak banyaknya terkait dengan HIV baik lintas program maupun lintas sektor.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Dari evaluasi kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Dairi dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas kesehatan masih perlu ditingkatkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi pada tahun 2025:

1. Masih adanya kematian ibu dan bayi;
2. Masih ada permasalahan gizi di masyarakat seperti gizi buruk, gizi kurang dan stunting pada balita;
3. Belum seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan;
4. Cakupan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis masih rendah;
5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak;
6. Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
7. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS di masyarakat;
8. Masih minimnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana maupun SDM;

2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal Renja merupakan proses membandingkan antara rancangan awal Renja dengan analisis kebutuhan. Catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal Renja dengan hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut :

Penambahan anggaran belanja antara lain :

- a. Penambahan anggaran belanja JKN untuk pencapaian target UHC Kab.Dairi TA. 2025;
- b. Rasionalisasi belanja DAU SG Bidang Pendidikan;
- c. Kegiatan yang bersumber dari DBH CHT (Bidang Kesehatan) TA. 2025;
- d. Kegiatan yang bersumber dari SiLPA Pengelolaan Pelayanan JKN Kapitasi TA. 2024;
- e. Kegiatan yang bersumber dari SiLPA DAK Non Fisik BOK Kabupaten TA. 2024;
- f. Kegiatan yang bersumber dari SiLPA DAK Fisik s/d TA. 2023 Bidang Kesehatan;
- g. Kegiatan yang bersumber dari SiLPA DAU SG Bidang Kesehatan TA. 2024;
- h. Kegiatan belanja yang melampaui tahun anggaran (KDP) TA. 2024;
- i. Rasionalisasi belanja yang bersumber dari DBH Pajak Rokok Provinsi TA. 2025;
- j. Rasionalisasi belanja gaji THL bulan Agustus s/d Oktober (3 bulan);
- k. Rasionalisasi belanja gaji P3K Paruh Waktu Tahap I TA. 2025 bulan November dan Desember;

- I. Realokasi/penambahan anggaran belanja gaji P3K Paruh Waktu TA.2025 bulan November dan Desember.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2025 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2025: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2025, sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan

antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

4. **Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.**

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri. 2020-2025 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2025, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

- 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
- 2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- 3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- 4. Peningkatan sumber daya kesehatan
- 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

3.2 **Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan tahun 2025 disesuaikan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Dairi, dimana pembangunan bidang kesehatan masuk dalam misi RPJMD sehingga tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan adalah :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Sasaran pada Tahun	
					2025	2026
1	Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan		1	Indeks Kesehatan	0,84 Poin	0,85 Poin
		Meningkatnya Kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat	1	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	55	50
			2	Jumlah Kematian Bayi	20	15
			3	Prevalensi stunting	18.73	16.24
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	1	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskesmas	Baik	Baik
			2	Indek Kepuasan Layanan PSC 119	Baik	Baik
			3	Indeks Kepuasan Layanan RSUD	Baik	Baik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Sasaran pada Tahun	
					2025	2026
		Menurunnya Angka Kesakitan	1	Angka morbiditas	9,2 %	9%
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan	1	Cakupan Rumah Tangga ber PHBS	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1	Predikat Laporan Kinerja	BB	BB

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2025

Renja instansi pemerintah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Renja meliputi apa yang akan dilakukan dengan berbagai strategi, target, pendanaan dan keluaran dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan, yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sangat tergantung pada situasi yang dinamis serta isu-isu terkini yang memungkinkan tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disusun pada Renja Akhir tahun 2025. Untuk itu agar perencanaan lebih realibel, efektif dan efisien perlu dilakukan kajian dan mempertimbangkan situasi yang dinamis yang menjadi faktor peluang, penghambat serta perubahan pada kekuatan dan kelemahan yang muncul dan dilakukan evaluasi dan perubahan Renja pada tahun berjalan.

Pada tahun 2025 dengan memperhatikan hasil capaian kinerja peksanaan kegiatan APBD dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi perlu melakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berikut ringkasan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 :

Tabel 4.1.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan
Kabupaten Dairi Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14		
						Dinas Kesehatan			168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	119.193.152.397,00	103.981.736.857,00	103.630.242.946,00				
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	102.368.116,00	55.000.000,00	55.000.000,00				
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	72.368.116,00	40.000.000,00	25.175.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	5 Laporan	5 Laporan	30.000.000,00	15.000.000,00	11.885.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Alokasi Umum (DAU)		

	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		
3	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	119.193.152.397,00	103.981.736.857,00	103.630.242.946,00		
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	197.250.000,00	0,00	0,00		
	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	47.250.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	31 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	908.903.200,00	370.292.147,00	370.292.147,00		
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	303.908.000,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	205.292.147,00	133.869.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1					NON URUSAN			168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	27.560.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1					NON URUSAN			168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	119.193.152.397,00	103.981.736.857,00	103.630.242.946,00		
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.733.694.748,00	2.516.927.853,00	2.516.927.853,00		
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		
7	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	119.193.152.397,00	103.981.736.857,00	103.630.242.946,00		

	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	6.733.694.748,00	2.516.927.853,00	2.516.927.853,00		
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	6.668.924.748,00	2.496.927.853,00	2.234.796.289,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.404.555.200,00	242.590.000,00	242.590.000,00		
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.180.000,00	42.180.000,00	42.180.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	133.880.000,00	100.410.000,00	100.410.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	1					NON URUSAN				168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu II	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1					NON URUSAN				168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		
10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	119.193.152.397,00	103.981.736.857,00	103.630.242.946,00		
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.404.555.200,00	242.590.000,00	242.590.000,00		
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		

						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	980.000.000,00	980.000.000,00	972.249.950,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas							
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	3 Unit	1.775.000.000,00	5.508.162.000,00	6.023.091.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit	10 Unit	2.575.000.000,00	2.575.000.000,00	2.531.908.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50843 Orang	50843 Orang	90.000.000,00	1.866.107.000,00	514.896.450,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	205848 Orang	205848 Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	44.155.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35623 Orang	35623 Orang	75.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89928 Orang	89928 Orang	75.000.000,00	45.000.000,00	39.155.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2949 Orang	2949 Orang	75.000.000,00	45.000.000,00	39.155.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 Orang	11 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	12.360.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok								
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	7 Tatanan	30.000.000,00	20.000.000,00	12.662.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	0,00	402.482.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	0,00	11.316.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	134.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan,	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

													Semua Kel/Desa	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	94.244.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen		94.244.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	90.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-	0 0		45.000.000,00	30.000.000,00	24.155.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	18 Unit	18 Unit		45.000.000,00	30.000.000,00	22.986.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	210.750.000,00	107.300.000,00	107.300.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	699.250.000,00	1.393.047.000,00	1.393.047.000,00		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250 Orang	250 Orang	699.250.000,00	1.393.047.000,00	1.393.047.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
13	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	169.970.000,00	78.000.000,00	54.753.000,00		
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha	-	-	-	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		

						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	30.000.000,00	26.493.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	0,00	0,00	0,00		
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

							Depot Air Minum (DAM)							
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	-	39.970.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00		
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	20 Unit	20 Unit		39.970.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
14	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	280.000.000,00	337.930.000,00	407.114.000,00		

							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	242.500.000,00	300.430.000,00	373.121.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
									J U M L A H	168.879.531.133,00	175.616.819.357,00	182.324.954.946,00		

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi, tentunya memiliki tantangan/ masalah dalam pelaksanaan kegiatan dalam rencana kerja dinas kesehatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil revidi terdapat perbedaan antara Renja Tahun 2025 dengan Perubahan Renja 2025 terutama dalam konsep strategi dan arah kebijakan serta kegiatan. Berdasarkan analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi terdapat penambahan dan pengurangan kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran. Pembangunan kesehatan pada akhirnya merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yakni untuk memperoleh akses akan layanan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi yang perlu perhatian khusus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perubahan Renja Dinas Kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan. Sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025. Perubahan renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi untuk tahun 2025. Semoga upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi tahun 2025 dapat menjadi lebih terarah dan Terukur.

Sidikalang, September 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Dairi,



Dr. dr. Henry Manik, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19680623 200003 1 001